

INTERNALISASI SEMANGAT NASIONALISME MELALUI PENDEKATAN HABITUASI (Perspektif Filsafat Pendidikan)

Chairul Anwar

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Raden Intan Lampung

chairuliain@yahoo.co.id

Abstrak

Nasionalisme di Indonesia lahir ketika penduduk negeri ini berada di bawah pemerintahan jajahan Belanda. Ideologi ini muncul menjadi sebuah kesadaran kolektif dipicu oleh perasaan senasib di masa lalu dan di masa yang sedang dijalani, dan yang lebih penting lagi adalah dipersatukan oleh cita-cita yang sama untuk masa depan. Namun dalam perkembangannya, semangat nasionalisme di kalangan generasi muda tampak melemah. Fenomena ini menunjukkan bahwa peran lembaga pendidikan menjadi sangat penting- tidak hanya agar peserta didik mengerti dan memahami makna nasionalisme tetapi yang terpenting mampu menghayati nilai-nilai filosofis di balik semangat nasionalisme itu. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan mengenalkan kembali nilai-nilai nasionalisme, menghayatinya melalui pendekatan habituasi (pembiasaan) di sekolah, sehingga nilai-nilai nasionalisme tertanam dalam jiwa para siswa. Dengan menggunakan pendekatan habituasi, para guru diyakini akan mampu menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada peserta didik baik melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan pemberian keteladanan, maupun kegiatan terprogram.

Kata kunci: *Nasionalisme; Pendidikan Nilai; Pendekatan Habituasi*

Abstract

INTERNALIZATION OF THE SPIRIT OF NATIONALISM THROUGH HABITUATION APPROACH. (PHILOSOPHY OF EDUCATION PERSPECTIVE): Nationalism in Indonesia was born when the people of the country was under the Dutch colonial rule. This ideology appears to be a collective consciousness triggered by feelings of kinship in the past and in the time being, and more importantly, is united by the same goal for the future. In its development, however, the spirit of nationalism among the younger generation seem to weaken. This phenomenon indicates that the role of educational institutions are very important - not only to make the students understand and grasp the meaning of nationalism but also to impress them the philosophical values behind it. One way that can be taken to instill the values of nationalism is through the approach of habituation in schools, so that the values of nationalism embedded in the psyche of the student. By using the approach, teachers are believed to be able to instill the values of nationalism to their students either through routine activities, spontaneous activities, awarding exemplary activities, or, even, programmed activities.

Keywords: *Instilling the Spirit of Nationalism; Educational Value; Habituation Approach*

A. Pendahuluan

Nasionalisme merupakan suatu paham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia.¹ Nasionalisme bagi negara seperti Indonesia sangat dibutuhkan, sebab paham inilah yang dapat menjaga keutuhan bangsa. Rasa persatuan dan kesatuan hanya dapat terwujud ketika seluruh masyarakat memiliki rasa nasionalisme yang kuat. Namun sangat disayangkan, semangat nasionalisme kini tampaknya mulai mengendur di kalangan generasi muda.

Dalam beberapa bulan terakhir, ada tudingan di berbagai media massa tentang semangat nasionalisme di kalangan pelajar kita yang semakin pudar. Hal ini disebabkan oleh sistem

¹ George Mc Turnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia* (Depok: Komunitas Bambu, 2013), h. 4.

pendidikan yang tidak mampu menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri mereka. Dalam riset yang dilakukan Maarif Institute Jakarta pada tahun 2011, disebutkan bahwa sebanyak 60 persen siswa di Jabodetabek—terutama pelajar SMP dan SMA—tidak percaya lagi terhadap nilai-nilai Pancasila.²

Temuan tersebut rupanya direspon beberapa lembaga dengan tujuan untuk mencari solusi bagi sistem pendidikan yang lebih baik. Maarif Institute bekerjasama dengan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI), Lembaga Manajemen Universitas Negeri Jakarta (LM-UNJ), Gerakan Usaha Pembaruan Pendidikan Islam (GUPPI) dan Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) memetakan kembali arah pendidikan Indonesia yang nantinya ide-ide tersebut disampaikan kepada pemerintah agar dapat ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan. Rumusan konsepnya ditargetkan selesai pada bulan September-Oktober 2014.

Langkah tersebut perlu didukung lebih lanjut dari berbagai perspektif dan pendekatan, termasuk melalui penelitian kalangan akademik. Secara teoritik, upaya untuk menggalakkan lagi semangat nasionalisme melalui jalur pendidikan dapat ditempuh dengan melaksanakan pengintegrasian nilai-nilai nasionalisme dalam kegiatan pembiasaan di sekolah.

B. Merumuskan Kembali Pengertian Nasionalisme

Sebelum melakukan proses internalisasi nilai-nilai nasionalisme dalam jalur pendidikan, langkah utama yang penting dilakukan adalah merumuskan kembali pengertian nasionalisme. Makna nasionalisme seringkali direduksi secara sempit di negeri ini. Padahal, tema nasionalisme bukan sesuatu yang asing dan baru bagi kalangan terpelajar dan kaum terdidik di Indonesia. Diskusi, serasehan, perbincangan, bahkan perdebatan sengit perihal nasionalisme dengan mudah dapat dilacak dalam buku-buku sejarah berdirinya Republik Indonesia, atau dalam buku-buku bertema revolusi Indonesia.

Perdebatan dan perbenturan ide-ide nasionalisme tersebut

² Informasi ini penulis peroleh dari situs resmi Maarif Institute, www.maarif_institut.com dan antara.com.

berlangsung sangat panjang, terkadang terasa hangat, terkadang memanas, melelahkan, disebabkan karena “Nasionalisme Indonesia adalah suatu ‘agama baru’ bagi kaum cendekiawan Indonesia pada awal abad sampai pertengahan abad duapuluh”, tulis Daniel Dhakidae.³

Daniel Dhakidae mungkin berlebihan ketika menempatkan nasionalisme sebagai sebuah agama. Namun jika kita menyimak percaturan pendapat mengenai nasionalisme Indonesia, ungkapan tersebut tidaklah berlebihan. “Agama baru” ini dengan susah-payah disebarkan oleh kaum terdidik kepada rakyat Indonesia sebagai proses pendidikan politik yang terpenting dalam sejarah nasionalisme kita.

Nasionalisme adalah suatu paham yang berdiri karena adanya bangsa. Namun yang jadi soal kemudian adalah apa itu bangsa. Bahkan pertanyaan lain bisa juga diajukan di sini: apakah bangsa identik dengan negara?

Inilah tema yang sepiantas tidak mengandung problema akademis dan filosofis, karena sudah diterima begitu saja tanpa konflik. Maka, jika kita hendak mengajak siswa dan mahasiswa kita agar kembali memahami dan menghayati nasionalisme Indonesia, langkah penting yang mesti dilakukan adalah merumuskan kembali pemahaman tentang nasionalisme itu sendiri.

Di Indonesia, konsep “negara” dan “bangsa” memiliki pijakan yang berbeda, bahkan berlawanan. Tetapi, sebutan “bangsa dan negara” sudah umum didengar, seolah-olah tidak mengandung bias dan netral dalam dirinya, padahal keduanya berbeda dan tak jarang bertentangan.

Tulisan ini ingin mencoba melihat perspektif nasionalisme lebih luas melalui kerangka analisis filsafat pendidikan, karena hemat penulis; filsafat pendidikan itu berjalan di atas tiga kerangka dasar, yakni berpikir logis, kritis dan kreatif. Ciri filsafat pendidikan adalah analisisnya terhadap hal-hal bersifat

³ Daniel Dhakidae, “Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa sebagai Komunitas-komunitas Terbayang”, dalam Kata *Pengantar* Benedict Anderson, *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*, terj. Omi Intan Naomi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, 2001), h. xvi.

mendasar, menggugat atau mengungkit.⁴

Kajian filsafat pendidikan penting di sini karena ia memperkarakan suatu persoalan secara logis, analitis, kritis dengan menggali dan mengkonstruksi gagasan berdasarkan cara berpikir teoritis sekaligus empiris.⁵ Misalnya, apa perbedaan negara dan bangsa, mengapa masalah itu perlu diungkit kembali, sejak kapan nasionalisme-bangsa bergeser menjadi nasionalisme-negara, mengapa ini terjadi, bagaimana makna-maknanya berubah seiring perjalanan waktu, dan mengapa semangat nasionalisme mengendur di kalangan generasi muda, apa akar persoalannya, bagaimana memecahkan dan mengatasinya, terutama melalui pendidikan?

Itulah cara kerja khas filsafat pendidikan, yaitu senantiasa bertanya, mempertanyakan, menggugat, membongkar, dan merekonstruksi ulang. Tujuannya untuk menemukan hakekat, makna dan pemahaman yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah-akademis.

Dari persoalan-persoalan yang dikupas secara filosofis tersebut, kemudian diajukan pertanyaan yang ada hubungannya dengan proses pendidikan: apa yang dapat diambil hikmah dari masalah tersebut? Apa yang dapat dipelajari generasi kini (siswa, mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya) mengenai *nasionnya*, *bangsanya*, *negaranya*? Apa relevansi tema tersebut bagi kita yang hidup di masa kini?

Dalam menjawab masalah tersebut, terlebih dahulu perlu

⁴ Ahmad Janan Asifuffin menyebut istilah “mengungkit” sebagai suatu dasar berpikir dalam filsafat pendidikan Islam. Menurutnya, “mengungkit” bisa berarti mempersoalkan sesuatu atau menyinggung dan mengangkat suatu kejadian di masa lalu untuk dibicarakan. Atau mengangkat kembali suatu masalah seperti nasionalisme misalnya, kemudian permasalahan tersebut ditelaah secara logis, kritis dan kreatif. Lihat Ahmad Janan Asifuffin, *Mengungkit Pilar-Pilar Pendidikan Islam (Tinjauan Filosofis)*, cet.ke-2, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2010), h. 1

⁵ Menurut Ahmad Janan Asifuddin, ada anggapan keliru di kalangan orang Indonesia bahwa makna filosofis seolah-olah terlepas dari makna empiris. Padahal dapat saja keduanya saling menopang dan memperkuat sehingga filsafat pendidikan benar-benar menjadi kuat karena ditopang tidak hanya cara berpikir teoritis, tetapi juga ada sejumlah fakta empiris yang mendukung dan memperkuatnya. *Ibid.*, h. 2-10

dikaji apa makna bangsa dan negara karena keduanya memiliki pengertian yang berbeda. Baik bangsa maupun negara memiliki ciri khas yang membedakan keduanya dengan bangsa atau negara lain di dunia. Ciri khas suatu bangsa merupakan identitas dari bangsa yang bersangkutan. Ciri yang dimiliki suatu negara juga merupakan identitas dari negara yang bersangkutan. Identitas-identitas tersebut telah disepakati dan diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional bangsa.

Tokoh-tokoh nasional pada masa perjuangan kemerdekaan banyak menyinggung soal bangsa dan kebangsaan, seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Ki Hajar Dewantara, dan lain-lain. Sedangkan negara muncul belakangan, karena negara merupakan sebuah bentuk tata-sosial kehidupan politik yang paling umum dan mendunia di zaman ini. Karena ada berbagai ragamnya, negara sulit didefinisikan dalam sebuah rumusan yang ketat dan tajam, namun ia dapat dikenali secara gamblang dalam kehidupan nyata melalui sejumlah kewenangannya yang dimilikinya.

Pada masa Orde Baru, dengan gampang kata “bangsa” dipersandingkan dengan “negara”, seperti dalam ungkapan “menjalankan rasa tanggungjawab terhadap bangsa dan negara”, atau “dalam kehidupan “berbangsa” dan “bernegara”. Banyak ungkapan sejenis yang menyangdingkan begitu saja antara “bangsa” dan “negara” dalam percakapan maupun dalam karya tulis, seolah keduanya tidak mengandung problem akademik.

Dalam ungkapan tersebut, “bangsa” dan “negara” bersanding seolah-olah tidak dan tidak pernah ada soal mendasar antara keduanya. Adalah Benedict Anderson yang pertama kali mempersoalkan penggunaan istilah “bangsa” dan “negara” dengan melacak secara kritis pergeseran nasionalisme-bangsa ke nasionalisme-negara melalui kajian antropologi filsafat yang mendalam.⁶

⁶ Benedict Anderson, *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*, h. 4. Dalam buku ini Anderson mengatakan bahwa nasion, atau bangsa, nasionalitas atau kebangsaan, nasionalisme atau paham kebangsaan, sangat sulit dirumuskan, didefinisikan. Kendati demikian, mensejajarkan, apalagi menyamakan, antara “bangsa” dan “negara” adalah tindakan yang tidak hanya keliru, tetapi juga tidak bertanggungjawab. *Ibid.*, h. 4, 5-10.

Tetapi kini, nasionalisme masa kini tidak begitu lagi kental dengan semangat revolusioner, walau pun warna primordial tetap mengemuka, bahkan kian intensif, terutama sejak Reformasi 1998. Isu negara Islam juga muncul walau tidak sekuat pada masa kemerdekaan. Beberapa daerah di Indonesia pernah dilanda sentimen primordialisme yang kental, seperti Papua, Aceh, bahkan Riau.

Jika dilacak secara filosofis, akar penyebabnya tumpang-tindih, jalin-menjalin, sehingga—mengutip metafor yang digunakan Muhaimin—“membuntal menjadi benang kusut yang menyedot perhatian untuk diurai secara rapi dan dapat ditemukan ujung-pangkalnya”.⁷ Persoalan separatisme, misalnya, muncul akibat kegagalan-kegagalan politik pemerintah yang makin lama makin meluas dalam menangani gejolak etno-nasionalisme. Setelah Aceh sedikit mereda, Papua masih terus bergejolak akibat perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah di masa lalu, dan terus berjalan hingga kini.

Dalam menghadapi hal itu, ada banyak eksperimen yang pernah dilakukan di Indonesia. Pada masa Orde Lama, persoalan nasionalisme dan separatisme dijawab dengan membentuk pemerintah dwitunggal, yaitu presidennya seorang Jawa dan wakilnya dari Sumatera. Pemilu 1955 adalah pemilu yang menggeser model dwitunggal dengan model multipartai yang rentan konflik. Menjelang tahun 1956, keretakan dwitunggal mulai terlihat. Bung Hatta⁸ akhirnya meletakkan jabatan wakil presiden dengan terus melakukan kritik yang kelak diterbitkan menjadi buku berjudul *Demokrasi Kita*. Keretakan ini mau-tak mau dianggap sebagai pemantik kembali bagi lahirnya rasa kecewa terhadap para elite di Jawa.

Jadi, kalau ditanya seberapa besar pengaruh dwitunggal, maka jawabannya sangat besar. Dengan adanya presiden dari Jawa dan wakilnya dari Sumatera, sedikit-banyak mampu mengimbangi kekuatan politik dan memperkecil semangat kedaerahan dan

⁷ Lihat Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006).

⁸ Bung Hatta, *Demokrasi Kita*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), h. 8.

kesukuan. Dan terbukti, setelah dwitunggal retak, api primordial dan kedaerah menguat kembali dan terus terpola sampai kini.

Jika dikaitkan dengan realitas politik dalam sepuluh tahun terakhir, persoalan keterwakilan masih terus jadi bahan diskusi dan perdebatan. Agak aneh bagi saya kalau para cendekiawan Indonesia menganggap tidak terlalu penting lagi memikirkan keterwakilan kedaerahan. Dalam pemilihan Preseiden 1999 menghasilkan presiden dan wakil presiden yang keduanya orang Jawa. Pemilihan Presiden 2004 nampak memperlihatkan keterwakilan Jawa-Sulawesi ketika Susilo Bambang Yudhoyono berpasangan dengan Jusuf Kalla. Namun ini tidak bertahan ketika kemudian Susilo Bambang Yudhoyono menggandeng Boediono.

Sebagian pengamat memang tidak menganggap relevan melihat kepemimpinan Indonesia dari perimbangan suku, tapi menurut mereka yang terpenting adalah dari kredibilitas atau kemampuan mereka untuk memimpin. Tentu saja saya setuju dengan prinsip semacam itu. Tapi kalau berbicara soal etika politik dan kepemimpinan di negeri yang rentan dengan gejala kekecewaan ini, saya kira persoalan pasangat Jawa-Sumatera atau Jawa-Bugis itu tetap relevan.

Sampai hari ini, masalah nasionalisme tetap menjadi persoalan yang tak bisa dilepaskan dengan persoalan bangsa. Persoalan identitas semakin mendapatkan momentumnya dengan diberlakukannya Otonomi Daerah sejak 1999, sebuah otonomi yang dimaknai dengan penggunaan simbol-simbol identitas daerah yang sempit, yang lebih kental dengan semangat etno-nasionalisme ketimbang kemandirian daerah.

Manipulasi kawasan daerah selama ini tidak hanya terbatas pada cara memperbaiki dan mengangkat kehidupan penduduknya. Tetapi lebih jauh mengungkapkan kecenderungan politik “pembedaan” yang menyebar hampir di semua daerah-daerah kawasan Nusantara. Bangsa sebagai gagasan, hanya “terbayang” sebagai cita-cita yang tak terdefiniskan dalam konteks negara bangsa. Apakah tanpa gagasan identitas bangsa kehidupan tidak akan bermakna? Ini suatu pertanyaan filosofis.

Adalah Ben Anderson yang secara eksplisit pernah

menyorot persoalan identitas dalam konteks demokratisasi di Indonesia. Dalam penjelasan Anderson, bangsa ini “dibayangkan” karena anggotanya tidak akan pernah mengenal satu sama lain, tetapi dalam benak tiap anggota itu, hidup suatu “bayangan” mengenai keterkaitan antara mereka. Bangsa ini dibayangkan sebagai terbatas, karena pasti ada perbatasan dengan bangsa-bangsa lain, dan sebagai berdaulat, karena negara yang berdaulat adalah lambang kebebasan yang diimpikan tiap bangsa. Bangsa itu dibayangkan sebagai suatu komunitas terbayang karena, lepas dari ketidakadilan dan penindasan yang mungkin secara nyata ada, bangsa selalu “dibayangkan” sebagai persaudaraan yang horisontal dan mendalam.⁹

Tesis Anderson tentang “bangsa sebagai komunitas-komunitas terbayang” tersebut, cukup berpengaruh bagi perumusan ulang atas nasionalisme masa kini. Ia tidak hanya mengulas persoalan kebangsaan dalam konteks pembentukan *nation-state*, tetapi lebih jauh membongkar ideologi yang berselimut di balik identitas kebangsaan dan paham kebangsaan. Namun Anderson tidak memasukkan etno-nasionalisme sebagai suatu gejala yang kini semakin menandatangani momentumnya sejak diberlakukan Otonomi Daerah, terutama di Indonesia. Papua tampak memilih etno-nasionalisme sebagai strategi untuk menyatakan identitas yang menekankan *truth claim* (klaim kebenaran) atas ciri, identitas, dan prinsip nilai suatu daerah. Etno-nasionalisme dapat juga dibaca sebagai bentuk hilangnya loyalitas dari suatu kelompok masyarakat tertentu terhadap sebuah ikatan yang lebih besar, yakni bangsa dan negara Indonesia. Jika etno-nasionalisme ini berlangsung cukup lama, tidak mustahil bila akan berujung pada tuntutan kemerdekaan daerah.

⁹ Untuk keperluan yang lebih luas perlu dikutip definisi nasionalisme dari Benedict Anderson yang sudah banyak dikutip. Nasion atau bangsa adalah “komunitas politis dan dibayangkan sebagai sesuatu yang bersifat terbatas secara inheren sekaligus berkedaulatan. Bangsa adalah sesuatu yang *terbayang* karena para anggota bangsa terkecil sekalipun tidak bakal tahu dan takkan kenal sebagian besar anggota lain, tidak akan bertatap muka dengan mereka itu, bahkan mungkin tidak pula pernah mendengar tentang mereka. Namun toh di benak setiap orang yang menjadi anggota bangsa itu hidup sebuah bayangan tentang kebersamaan mereka.

Clifford Geertz, dalam buku *The Interpretation of Cultures*, mengutip artikel Herbert Feith yang mengamati fenomena etno-nasionalisme dalam bentuk separatisme di masa lalu dengan sangat jernih. Geertz mengatakan:

Di Indonesia, kemapanan sebuah negara kesatuan bumi putra menghasilkan fakta bahwa Pulau-pulau Luar yang sedikit penduduknya namun kaya mineral menghasilkan sebagian besar pendapatan perdagangan dengan luar negeri dari negeri ini, sementara Jawa yang padat penduduk, miskin sumber itu mengkonsumsi sebagian besar pendapatannya; suatu hal yang jelas menyakitkan yang tak pernah terjadi dalam zaman penjajahan, dan sebuah pola kecemburuan regional berkembang menjadi kuat sampai pada titik pemberontakan senjata.¹⁰

C. Internalisasi Semangat Nasionalisme Melalui Pendekatan Habitiasi

Mencermati krisis nasionalisme di kalangan pelajar saat ini, serta berkembangnya etno-nasionalisme dan separatisme di Indonesia, maka perlu pengutamaan pendidikan nasionalisme sejak dini bagi setiap individu melalui proses internalisasi (penghayatan) dengan pendekatan pembiasaan (habitiasi).

Menurut Ibrahim Alfikiy, kebiasaan adalah pikiran yang diciptakan seseorang dalam benaknya, kemudian dihubungkan dengan perasaan dan diulang-ulang hingga akal meyakinkannya sebagai bagian dari perilakunya. Hukum pembiasaan itu terdiri dari enam tahapan, yakni (1) berpikir, (2) perekaman, (3) pengulangan, (4) penyimpanan, (5) pengulangan dan (6) kebiasaan. Berpikir maksudnya yaitu, seseorang memikirkan dan mengetahui nilai-nilai yang diberikan, lalu memberi perhatian, dan berkonsentrasi pada nilai tersebut. Perekaman, yakni setelah nilai-nilai diterima, otaknya merekam. Otaknya kemudian membuka file yang sejenis dengan pikiran itu dan menghubungkan dengan pikiran-pikiran lain, yang sejenis atau yang dinilai bermanfaat baginya. Pengulangan, yakni seseorang memutuskan untuk mengulangi nilai-nilai yang baik itu dengan perasaan yang sama. Penyimpanan,

¹⁰ Clifford Geertz, *Tafsir Kebudayaan*, terj. Francisco Budi Hardiman (Yogyakarta: Kanisius, 1992), h. 127.

yaitu perekaman dilakukan berkali-kali terhadap perilaku nilai-nilai yang masuk tadi, pikiran menjadi semakin kuat. Akal menyimpannya dalam polder dan menghadirkan ke hadapan anda setiap kali anda menghadapi kondisi serupa. Melepaskan diri dari perilaku semacam itu akan semakin sulit karena pikiran itu sudah tersimpan di dalam polder akal bawah sadarnya. Pengulangan, yakni seseorang mengulang kembali perilaku nilai-nilai yang baik yang tersimpan kuat di dalam akal bawah sadarnya. Ia dapat merasakan bahwa dirinya telah mengulangi perilaku itu atau terjadi begitu saja di luar kemauannya. Setiap kali memori yang tersimpan di akal bawah sadar itu diulang, ia semakin kuat dan menancap serta berurat berkar dalam jiwa. Dan kebiasaan menjadi karakter. Karena pengulangan nilai-nilai yang baik yang berkelanjutan dan tahapan-tahapan di atas yang dilalui, akal manusia meyakini bahwa kebiasaan ini merupakan bagian terpenting dari perilaku. Maka, ia memperlakukannya seperti bernapas, makan, minum, atau kebiasaan lain yang mengakar kuat. Jika sudah begitu, orang tidak dapat mengubahnya dengan hanya berpikir untuk mengubah, kemauan keras, atau dengan sesuatu yang berasal dari dunia luar semata.¹¹

Melalui pendekatan pembiasaan tersebut, pengenalan semangat nasionalisme kepada peserta didik menjadi sebuah jalan keluar bagi proses perbaikan bangsa. Situasi sosial yang ada menjadi alasan logis jika pendidikan nasionalisme segera digalakkan kembali. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan melaksanakan pengintegrasian nilai-nilai nasionalisme dalam kegiatan pembiasaan pada satuan pendidikan sekolah dasar dan menengah. Strategi ini ditempuh dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan usia dan kejiwaan peserta didik. Kegiatan pembiasaan yang selama ini telah diselenggarakan oleh sekolah dasar adalah salah satu media potensial dalam rangka menanamkan nilai-nilai nasionalisme pada peserta didik.

Secara konkret, caranya dapat ditempuh dengan mengintegrasikan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) dan Bahasa Indonesia, terutama dalam hubungannya

¹¹ Ibrahim Elfiky, *Terapi Berpikir Positif*, terj. Khalifurrahman Fath dan M. Taufik Damas, cet. ke-13 (Jakarta: Zaman, 2013), h. 91-92.

dengan bahasa nasional sebagai bahasa persatuan . Mata pelajaran PKn lebih terkait secara langsung dengan tema bangsa, sementara Bahasa Indonesia lebih pada tema bahasa. Baik bangsa maupun bahasa amat penting dihayati bagi peserta didik sebagai proses pembentukan semangat nasionalisme.

Langkah selanjutnya adalah, menanamkan nilai-nilai dan semangat nasionalisme pada seluruh warga bangsa, khususnya pada generasi muda. Langkah efektif untuk membangun dan menanamkan jiwa nasionalisme kepada generasi muda ditempuh melalui internalisasi dengan pendekatan habituasi.

Pendekatan habituasi hemat penulis mampu menanamkan nilai-nilai nasionalisme kepada peserta didik. Pelaksanaan kegiatan pembiasaan bisa dilakukan melalui beberapa pendekatan, strategi, metode dan model. Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan nasionalisme melalui pembiasaan dapat dilakukan melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan pemberian keteladanan dan kegiatan terprogram.

Nilai-nilai nasionalisme yang ditanamkan kepada peserta didik dalam setiap kegiatan berbeda-beda. Misalnya pada saat upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin itu, nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan upacara bendera di antaranya membiasakan siswa untuk bersikap tertib dan disiplin, membiasakan siswa berpenampilan rapi, meningkatkan kemampuan memimpin, membuat siswa patuh pada aturan yang ada, dan menanamkan rasa tanggungjawab. Tujuannya adalah agar peserta didik tidak hanya mengerti dan paham tentang nasionalisme, tetapi juga—dan ini yang terpenting—mampu menghayati semangat kebangsaan, cinta tanah air, patriotisme, semangat dan nilai-nilai kepahlawanan, idealisme serta membangkitkan peran peserta didik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kegiatan rutin yang dilakukan diwujudkan sebagai bentuk keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal kebersihan dan kesehatan, berlatih untuk selalu tertib dan patuh pada peraturan, bertanggungjawab terhadap tugas yang diberikan, menjaga kebersihan lingkungan, dan melatih keberanian.

Adapun bentuk kegiatan rutin yang dilakukan pelaksanaan pendidikan nasionalisme melalui pembiasaan antara lain melalui kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pramuka, upacara bendera yang dilaksanakan setiap hari Senin dan hari-hari besar nasional, senam pagi, kerja bakti, jadwal piket harian, dan kegiatan sebelum proses belajar mengajar.

Pembiasaan dalam kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan pendekatan pribadi, misalnya saling menyapa antar teman maupun antar guru, membuang sampah di tempatnya, memungut sampah yang berserakan, mengucapkan terima kasih. Peserta didik diajarkan untuk saling menghormati dan menyayangi antar sesama. Sikap ini terlihat pada saat masuk ke sekolah, peserta didik mengucapkan salam dan mencium tangan saat bertemu dengan bapak/ibu guru.

D. Penutup

Nasionalisme Indonesia merupakan sebuah penemuan sosial yang paling menakjubkan dalam perjalanan sejarah manusia Indonesia, paling tidak dalam seratus tahun terakhir. Tak ada satu pun ruang sosial di muka bumi yang lepas dari pengaruh ideologi ini. Tanpa nasionalisme, jalan sejarah Indonesia akan berbeda. Kendati demikian, nasionalisme juga ibarat pisau bermata dua; ia dapat menghidupkan peradaban Indonesia, tetapi juga dapat menghancurkannya, terutama jika nasionalisme yang berkembang diwarnai oleh semangat *chauvinis*, semangat kedacrahan yang berlebihan yang mengambil bentuk etno-nasionalisme serta separatisme. Oleh karena itu, lembaga pendidikan menjadi garda terdepan dalam menginternalisasi nilai-nilai nasionalisme di kalangan peserta didik sehingga mereka mampu menghayati semangat nasionalisme dengan baik.

Nasionalisme yang lebih cocok dalam realitas kekinian bangsa Indonesia adalah nasionalisme yang menjaga persatuan dan yang mampu mengatasi provinsialisme dan suku bangsa. Nasionalisme masa kini adalah suatu kesadaran sebagai bangsa yang disertai oleh hasrat untuk memelihara, melestarikan dan mengajukan identitas, integritas, memiliki ketangguhan karakter bangsa yang kuat dan beradab.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Benedict. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, 2001.
- Asifuffin, Ahmad Janan. *Mengungkit Pilar-Pilar Pendidikan Islam (Tinjauan Filosofis)*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2010.
- Dhakidae, Daniel. “Memahami Rasa Kebangsaan dan Menyimak Bangsa sebagai Komunitas-komunitas Terbayang”. Benedict Anderson. *Imagined Communities: Komunitas-Komunitas Terbayang*. terj. Omi Intan Naomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, 2001.
- Elfiky, Ibrahim. *Terapi Berpikir Positif*. terj. Khalifurrahman Fath dan M. Taufik Damas. cet. ke-13, Jakarta: Zaman, 2013.
- Geertz, Clifford. *Tafsir Kebudayaan*. terj. Francisco Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Hatta, Bung. *Demokrasi Kita*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004
- Kahin, George Mc Turnan. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Depok: Komunitas Bambu, 2013.
- Kohn, Hans. *Nasionalisme, Arti dan Sejarahnya*. Jakarta: PT.Pembangunan, 1984.
- Muhaimin, *Nuansa Baru Pendidikan Islam: Mengurai Benang Kusut Dunia Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Yatim, Badri. *Bung Karno, Islam dan Nasionalisme*. Jakarta: LogosWacana Ilmu, 1999.